

Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penatausahaan Keuangan Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2025

Rhobi Dwi Pamungkas*, Supartini, Syahriar Abdullah

Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penatausahaan Keuangan Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri beserta kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penatausahaan Keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Implementasi SIPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yakni kesesuaian prosedur pengeluaran kas, kesesuaian tata kelola pembukuan dan pelaporan serta konsistensi akuntabilitas pengguna. Kendala dalam implementasi SIPD penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri yaitu : (a) sulitnya mengakses server pada waktu tertentu karena digunakan oleh seluruh pemerintah daerah, (b) ketidaksempurnaan aplikasi yang menyebabkan perubahan dan penyempurnaan sistem berulang kali, (c) adanya perbedaan tata cara pengoperasian atau siklus penginputan, (d) teknis penginputan yang tidak boleh terjadi kesalahan serta (d) terbatasnya akses terhadap laporan keuangan yang dibutuhkan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi SIPD adalah : (a) Pemerintah Daerah membuat jadwal bergilir untuk input data, memecah beban kerja antar staf/bagian agar tidak semua masuk serentak pada waktu yang sama, (b) melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan serta keuangan daerah serta berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SETDA sebagai pengampu penerapan SIPKD penatausahaan keuangan terkait kendala yang terjadi, (c) berhati-hati dalam penginputan penatausahaan pengeluaran dan penerimaan, (d) menyusun manual terkait laporan keuangan yang dibutuhkan, dan (e) mengajukan penambahan hak akses viewer resmi melalui admin SIPD di daerah. Upaya yang dilakukan tersebut berjalan dengan baik dan sangat membantu dalam pelaksanaan SIPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.

Kata kunci: Evaluasi Berkala, Kompetensi, Koordinasi, Penatausahaan Keuangan, SETDA, SIPD, Teknologi

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3409>

*Correspondence: Rhobi Dwi

Pamungkas

Email: rhobidwip@gmail.com

Received: 11-11-2025

Accepted: 17-12-2025

Published: 04-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to describe the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in Regional Financial Administration at the Regional Secretariat of Wonogiri Regency, along with the constraints encountered and the efforts made to overcome them. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of the SIPD in Financial Administration at the Wonogiri Regional Secretariat is in accordance with the Wonogiri Regent Regulation Number 11 of 2021 concerning the System and Procedures for Regional Financial Management of Wonogiri Regency. The implementation of SIPD at the Regional Secretariat, specifically concerning regional financial accounting and reporting, meets the criteria for the suitability of cash expenditure procedures, the suitability of bookkeeping and reporting governance, and the consistency of user accountability. The main constraints in the implementation of the SIPD financial administration at the Wonogiri Regional Secretariat are: (a) difficulty accessing the server at certain times due to simultaneous use by all regional governments, (b) application imperfections leading to repeated system changes and refinements, (c) differences in operating procedures or input cycles, (d) the need for caution in technical data input, and (e) limited access to the required financial reports. The efforts undertaken to overcome these constraints include: (a) the Regional Government establishing rotating schedules for data input to distribute the workload, (b) updating the classification, codification, and nomenclature of

planning and regional finance, while coordinating with the SETDA regarding technical issues, (c) exercising caution when inputting expenditure and revenue transactions, (d) preparing manuals related to the necessary financial reports, and (e) officially applying for additional viewer access rights through the local SIPD administrator. These efforts have proceeded well and significantly aid the SIPD execution at the Wonogiri Regional Secretariat.

Keywords: *Competence, Coordination, Financial Administration, Periodic Evaluation, SETDA, SIPD, Technology*

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami transformasi mendasar melalui kebijakan otonomi daerah. Perubahan ini membawa konsekuensi logis berupa tuntutan yang semakin tinggi terhadap akuntabilitas publik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Otonomi memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangan secara mandiri, yang pada gilirannya menuntut sebuah sistem pengelolaan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Landasan hukum pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam siklus pengelolaan ini, tahapan penatausahaan keuangan merupakan proses krusial yang menentukan kualitas data dan informasi keuangan. Penatausahaan yang optimal mutlak diperlukan untuk memastikan setiap transaksi dicatat, dibukukan, dan dilaporkan secara akurat, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang kredibel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Upaya standarisasi dan integrasi data pembangunan serta keuangan daerah secara nasional, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan kebijakan untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kewajiban penggunaan sistem terintegrasi ini diperkuat melalui Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. SIPD dirancang sebagai solusi digital untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah data secara terpusat, dengan tujuan akhir mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang satu dan terpadu.

Implementasi SIPD ini berlaku wajib bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Indonesia, termasuk di lingkungan pemerintahan kabupaten Wonogiri. Sekretariat Daerah (SETDA) kabupaten Wonogiri, sebagai leading sector yang bertanggungjawab atas koordinasi dan pengelolaan administrasi keuangan daerah, serta menjadi subjek utama dalam penerapan sistem baru ini. Implementasi SIPD di SETDA Wonogiri menandai peralihan signifikan dari penggunaan aplikasi sistem keuangan sebelumnya SIPKD ke sistem baru, yang menuntut adaptasi dan kesiapan seluruh pengelola keuangan.

Meskipun kebijakan implementasi SIPD didasarkan pada tujuan yang ideal, proses transisi penerapan di lapangan. Khususnya di SETDA kabupaten Wonogiri, menunjukkan adanya kendala implementasi yang substansial. Sebagai aplikasi baru yang terpusat,

kendala yang muncul meliputi isu teknis maupun fungsional yang secara langsung mempengaruhi kelancaran tahapan penatausahaan keuangan daerah yang harus diselesaikan tepat waktu.

Kendala-kendala tersebut mencakup aspek teknis sistem yang kritical. Temuan awal mengindikasikan bahwa sistem SIPD sering mengalami keterlambatan akses (lemot), seringnya terjadi Error System, dan bahkan server down, terutama pada jam-jam kerja puncak. Selain itu, masalah jaringan internet yang tidak stabil turut memperlambat proses penginputan transaksi, yang mana isu-isu teknis secara kolektif menghambat efektivitas dan produktivitas dalam penatausahaan keuangan daerah.

Di samping isu teknis, masalah fungsional dan prosedural juga teridentifikasi, seperti belum lengkapnya beberapa menu vital, misalnya menu Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) yang sangat penting untuk penyusunan laporan keuangan sesuai SAP. Lebih lanjut, terdapat kendala prosedural dalam proses transaksi, seperti koreksi belanja yang prosesnya rumit, gagalnya pembuatan SPP, serta potensi inkonsistensi data, seperti saldo bank yang menggantung atau nilai anggaran yang menjadi ganda, yang semua ini menuntut perbaikan dan dukungan teknis yang cepat dari pengembangan sistem (Pusdatin).

Berdasarkan latar belakang yang memuat urgensi penerapan SIPD serasi identifikasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, penelitian ini merumuskan tiga masalah utama: (1) Apakah implementasi SIPD dalam penatausahaan keuangan di SETDA kabupaten Wonogiri sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri No. 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri? (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi SIPD di SETDA kabupaten Wonogiri? (3) Apa saja upaya yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan implementasi SIPD dalam penatausahaan keuangan daerah SETDA Wonogiri? Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis upaya-upaya penanganan kendala implementasi SIPD dalam penatausahaan keuangan di SERDA kabupaten Wonogiri selama periode penelitian.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang akuntansi sektor publik. Hasil evaluasi implementasi sistem informasi keuangan daerah ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan menjadi referensi empiris bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada efektivitas dan tantangan adopsi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks sistem perencanaan dan keuangan terintegrasi.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi yang konstruktif bagi pemerintah kabupaten Wonogiri, khususnya bagi Sekretariat Daerah (SETDA) sebagai pengguna utama SIPD. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPD, meminimalisir kendala, serta meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah menuju laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar melalui kebijakan otonomi daerah, yang mendorong meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Otonomi memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara mandiri, sehingga menuntut adanya sistem pengelolaan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2006).

Landasan hukum pengelolaan keuangan daerah telah diatur secara komprehensif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam siklus tersebut, penatausahaan merupakan tahapan penting yang berfungsi memastikan akurasi data dan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pentingnya ketepatan pencatatan dan pelaporan tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana publik (Hasniati, 2016).

Untuk mendukung integrasi data pembangunan dan keuangan nasional, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kewajiban penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Sistem ini dirancang untuk mengadministrasikan, mendokumentasikan, dan mengolah data pemerintahan daerah secara terpusat sehingga mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif (Dione & Faradina, 2020).

Implementasi SIPD berlaku bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Wonogiri. SETDA sebagai koordinator utama administrasi keuangan daerah menjadi pihak yang memegang peran penting dalam penerapan sistem ini. Pergeseran dari aplikasi lama SIPKD menuju SIPD menuntut kesiapan sumber daya manusia dan adaptasi prosedural dalam pengelolaan keuangan daerah (Nasution & Nurwani, 2021).

Namun demikian, implementasi SIPD dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Khususnya di SETDA Kabupaten Wonogiri, proses transisi menunjukkan adanya hambatan yang cukup signifikan, baik dari sisi teknis maupun operasional, yang berdampak pada kelancaran penatausahaan keuangan daerah (Laoli, Ndraha, & Telaumbanua, 2022).

Kendala teknis yang muncul antara lain lambatnya akses sistem, error system, serta server yang sering mengalami gangguan pada jam-jam sibuk. Kondisi jaringan internet yang tidak stabil juga memperlambat proses input transaksi sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas keuangan daerah secara keseluruhan (Pramana et al., 2023).

Di samping itu, kendala fungsional turut ditemukan, seperti belum lengkapnya menu-menu vital dalam SIPD, termasuk menu Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) yang berfungsi menyusun laporan keuangan berbasis SAP. Beberapa proses transaksi juga mengalami hambatan, misalnya koreksi belanja yang rumit, kegagalan dalam pembuatan SPP, serta potensi ketidaksesuaian data anggaran dan saldo bank (Tumija & Sinurat, 2023).

Dari berbagai kendala tersebut, penelitian ini kemudian merumuskan tiga fokus utama, yaitu: (1) kesesuaian implementasi SIPD dengan Peraturan Bupati Wonogiri No. 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) kendala yang

dihadapi dalam implementasi SIPD; serta (3) upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SIPD di SETDA Kabupaten Wonogiri. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis seluruh tahapan tersebut secara sistematis (Setyawan & Srihardjono, 2016).

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam kajian efektivitas implementasi sistem informasi pemerintahan daerah. Hasil penelitian dapat menjadi referensi empiris bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti tantangan dan peluang penerapan sistem keuangan berbasis teknologi informasi (Sobandi, Febriyanto, & Herdiant, 2023).

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama bagi SETDA sebagai pengguna utama SIPD. Hasil evaluasi ini diharapkan membantu meningkatkan optimalisasi pemanfaatan SIPD, memperbaiki kendala teknis maupun prosedural, serta mendorong terwujudnya laporan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu (Wati, Herawati, & Sinarwati, 2014).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai proses implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Metodologi penelitian yang dipilih adalah metode deskriptif karena berfokus pada analisis kondisi nyata di lapangan tanpa manipulasi variabel. Ruang lingkup penelitian (lokus) ditetapkan secara spesifik pada Sekretariat Daerah (SETDA) kabupaten Wonogiri, yang merupakan satuan kerja utama dan sentral dalam penatausahaan keuangan daerah. Batasan waktu penelitian mencakup periode implementasi SIPD dalam penatausahaan keuangan daerah sejak sistem tersebut diwajibkan, khususnya pada tahun anggaran 2022 hingga tahun 2025, untuk mencakup fase awal hingga fase adaptasi dan pematangan sistem.

Fokus utama penelitian ini adalah implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penatausahaan keuangan daerah. Variabel penelitian ini merupakan variabel independen yang dianalisis secara mendalam. Untuk tujuan evaluasi, variabel implementasi ini diperinci menjadi tiga fokus penelitian: (1) Deskripsi proses penatausahaan keuangan menggunakan SIPD, (2) Identifikasi dan kategori kendala-kendala teknis maupun fungsional yang dihadapi oleh pengguna, dan (3) Analisis upaya-upaya penanganan yang telah dilakukan oleh pihak SETDA maupun pemerintah daerah. Landasan analisis implementasi ini secara implisit mengacu pada dimensi-dimensi kunci keberhasilan kebijakan publik, seperti komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi yang mempengaruhi kinerja sistem.

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data untuk menjamin kelengkapan dan validitas temuan. Data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat aktif dalam operasional SIPD, informan kunci meliputi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Desa (PPK-SKPD) dan bendahara keuangan/umum. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi dan regulasi terkait, seperti Peraturan

Pemerintah No. 12 Tahun 2019, Permendagri No.70 Tahun 2019, dan Permendagri No. 77 Tahun 2020, serta dokumen internal SETDA terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan SIPD dan laporan implementasi sistem.

Tiga teknik pengumpulan data diterapkan secara terpadu untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Pertama, wawancara mendalam (In-depth interview) dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan kunci untuk menggali pengalaman subjektif mereka terkait kendala teknis, kesulitan prosedur, dan upaya penanganan yang dilakukan di lapangan. Kedua, penyebaran kuesioner/survei digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dan deskriptif yang lebih luas dari sejumlah pengguna SIPD, terutama untuk mengidentifikasi frekuensi dan jenis kendala teknis yang paling sering dialami. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder, data kelembagaan, serta bukti fisik berupa surat edaran dan laporan yang berkaitan dengan implementasi SIPD.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-evaluatif. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan dan interaktif, mengikuti tiga tahapan utama. Tahapan pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data mentah dari hasil wawancara dan kuesioner berdasarkan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data (data display), yaitu pengorganisasian data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi atau tabel agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification), dimana temuan-temuan diverifikasi dengan data yang ada dan ditarik menjadi kesimpulan akhir yang menjawab tujuan penelitian, yaitu evaluasi implementasi SIPD dalam penatausahaan keuangan daerah.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada informan serta dokumentasi diperoleh dari beberapa temuan terkait implementasi SIPD, kemudian hasil wawancara tersebut dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang disajikan secara sistematis. Sekretariat Daerah mulai menggunakan aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan sejak tahun 2022 setelah mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri pada bulan Januari Tahun 2022 dengan mempedomani Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. SIPD merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung implementasi program satu data serta untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memungkinkan penyajian database secara elektronik dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah di SETDA Wonogiri

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menggantikan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) sebelumnya. Tujuan utama peralihan ini adalah untuk

menstandarisasi dan mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, dari perencanaan hingga pelaporan, secara nasional, sehingga menciptakan single data system. Dalam konteks penatausahaan, SIPD berfungsi sebagai platform vital yang digunakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan bendahara pengeluaran untuk mengadministrasikan seluruh transaksi belanja. SIPD memfasilitasi proses kritis seperti pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Keberhasilan penatausahaan sangat bergantung pada sinkronisasi data real-time dan koneksi yang stabil dengan server pusat yang dikelola oleh Pusdatin Kemendagri.

Identifikasi Kendala Implementasi SIPD (Kualitas Sistem dan Sumber Daya)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD masih menghadapi serangkaian kendala yang menghambat efektivitas dan efisiensi penatausahaan. Kendala ini dapat dikelompokkan menjadi isu teknis dan fungsional, terkait erat dengan variabel kualitas sistem dan sumber daya dalam kerangka implementasi kebijakan.

Kendala Teknis (Infrastruktur dan Konektivitas)

Kendala teknis mendominasi keluhan pengguna. Data dari kuesioner menunjukkan bahwa isu-isu berikut sering muncul, terutama pada jam-jam kerja puncak:

- 1) Seringnya server down: kondisi ini menyebabkan aplikasi tidak bisa diakses sama sekali, secara signifikan menunda seluruh proses penatausahaan.
- 2) Kinerja sistem yang lambat (lemot) dan timeout: pengguna sering mengalami kelambatan akses dan putus koneksi otomatis (timeout), yang memperlama waktu yang dibutuhkan untuk input dan memproses satu transaksi.
- 3) Gangguan jaringan internet lokal: meskipun SIPD merupakan sistem terpusat, ketidakstabilan jaringan internet di lokasi SETDA Wonogiri turut memperburuk masalah aksesibilitas dan loading time system.
- 4) Sering terjadi error system: munculnya bug atau error yang tidak teridentifikasi dan memerlukan penanganan dari pengembangan pusat (Pusdatin).

Kendala teknis yang terjadi merupakan indikasi jelas dari rendahnya kualitas sistem dan sumber daya infrastruktur di tingkat pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas server yang disediakan oleh Pusdatin Kemendagri belum memadai untuk menampung beban transaksi yang dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah secara simultan, terutama pada waktu-waktu kritis mendekati batas akhir penatausahaan atau jam kerja puncak. Ketidakstabilan ini secara fundamental merusak kepercayaan pengguna terhadap sistem dan secara langsung melanggar prinsip efisiensi yang seharusnya diwujudkan oleh sistem informasi terpadu.

Kendala Fungsional dan Prosedural (Struktur Birokrasi)

Kendala ini menunjukkan kurangnya adaptasi sistem terhadap kebutuhan operasional dan prosedural birokrasi daerah.

- 1) Proses koreksi belanja yang rumit: prosedur untuk melakukan koreksi atau perbaikan terhadap transaksi belanjaj yang sudah terlanjur diinput dinilai sangat berbelit-belit dan memakan waktu, sehingga memperlambat proses pencairan.
- 2) Ketidaklengkapan menu esensial: menu Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) belum berfungsi optimal atau lengkap, padahal menu ini krusial untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan SAP.
- 3) Kasus inkonsistensi data fatal: ditemukan kasus-kasus serius yang menyebabkan kerancuan data, seperti saldo bank bendahara lama yang “menggantung” (tidak terintegrasi sempurna saat transisi), nilai anggaran Bantuan Modal (BM) yang terinput ganda (2x lipat), dan gagalnya pembuatan SPP di akun PPK yang membutuhkan perbaikan oleh Pusdatin selama kurang lebih tiga bulan.

Kendala-kendala di atas tidak hanya mengganggu proses kerja harian, tetapi juga berpotensi mengancam kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Jika data dasar yang digunakan dalam penatausahaan sudah cacat, Laporan Keuangan Daerah (LKD) yang dihasilkan tidak akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya, yang bertentangan dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan tujuan reformasi keuangan daerah.

Ketiadaan atau ketidaklengkapan menu Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) menunjukkan adanya kesenjangan fungsionalitas dalam desain sistem. Fungsi utama dari akuntansi sektor public adalah menghasilkan laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan. Jika modul pelaporan ini belum matang, pengguna di daerah terpaksa mencari solusi alternatif atau menunda proses pelaporan, padahal tujuan SIPD adalah menyediakan integrasi end-to-end. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi SIPD masih fokus pada tahap penatausahaan (transaksi) dan belum sepenuhnya siap pada tahap pelaporan.

Upaya Penanganan Kendala Implementasi

SETDA kabupaten Wonogiri dan pihak terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang muncul, berfokus pada koordinasi dan peningkatan sumber daya internal

Upaya Internal (Sumber Daya dan Sikap Pelaksana)

- 1) Peningkatan jaringan lokal: pemerintah daerah berusaha memastikan ketersediaan dan kestabilan jaringan internet internal di lingkungan SETDA meskipun masih terbatas.
- 2) Pelatihan dan pendampingan: dilakukan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan sikap pelaksana (kompetensi PPK-SKPD dan bendahara) agar mahir mengoperasikan SIPD dan meminimalkan human error.
- 3) Apresiasi kecepatan response: meskipun kendala jaringan sering terjadi, beberapa informan memberikan apresiasi terhadap kecepatan penanganan masalah teknis yang dapat diselesaikan secara internal.

- 4) Usulan server bayangan regional: server bayangan (mirror server) di tingkat regional, seperti yang diusulkan untuk wilayah Jawa Tengah, memiliki tujuan untuk mengatasi masalah latensi dan server down yang bersumber dari pusat. Dengan adanya server regional, beban akses dapat terbagi, dan kecepatan transaksi dapat ditingkatkan, sehingga secara langsung memperbaiki kualitas sistem yang selama ini menjadi penghambat utama.
- 5) Kebutuhan update fungsional yang terencana: untuk mengatasi kendala fungsional seperti rumitnya koreksi belanja dan belum lengkapnya AKLAP, diperlukan adanya update fungsional yang terencana dan berbasis masukan dari pengguna di daerah. Perbaikan harus memprioritaskan prosedur-prosedur yang kritis dan sering digunakan, memastikan bahwa prosedur digital di SIPD selaras dengan kebutuhan struktur birokrasi riil di pemerintah daerah, sehingga memudahkan bukan mempersulit.

Upaya Eksternal (Komunikasi dan Layanan)

- 1) Pelaporan cepat ke Pusdatin: setiap kali terjadi error system atau server down yang tidak dapat diselesaikan secara lokal. SETDA segera melakukan komunikasi dan pelaporan ke pihak Pusdatin Kemendagri.
- 2) Kendala respon Pusdatin: sayangnya, kendala yang bersifat mendasar seperti perbaikan bug fatal (contohnya kegagalan SPP) dan masalah server down seringkali membutuhkan waktu penanganan yang lama dari Pusdatin, yang menunjukkan perlunya perbaikan pada kualitas layanan dan dukungan teknis dari penyedia sistem pusat. Dalam konteks sistem terintegrasi nasional, Service Level Agreement (SLA) untuk penanganan error harus cepat dan terukur, agar penatausahaan daerah tidak terhambat.

Pembahasan dan Analisis Model Kebijakan

Berdasarkan analisis kualitatif, kendala implementasi SIPD ini dapat dievaluasi menggunakan Model Implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang fokus pada empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Tabel 1. Analisis Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Variable Edwards III	Analisis dalam Konteks SIPD	Dampak pada Penatausahaan
Sumber daya	Infrastruktur server dari jaringan pusat tidak memadai, mengakibatkan sering terjadi server down dan lemot.	Menghambat produktivitas dan menunda penyelesaian penatausahaan.

Variable Edwards III	Analisis dalam Konteks SIPD	Dampak pada Penatausahaan
Sikap pelaksana	Secara pelaksana menunjukkan kemauan, namun kendala berulang kali muncul berpotensi menurunkan motivasi dan kepercayaan terhadap sistem.	Menurunkan efisiensi dan menciptakan ketergantungan pada dukungan teknis pihak ketiga.
Komunikasi	Lambatnya respons Pusdatin terhadap bug fata menunjukkan jalur komunikasi dan respons dukungan teknis yang belum optimal.	Masalah teknis berlangsung lama, mengganggu kepatuhan waktu penatausahaan.
Struktur birokrasi	Prosedur dalam sistem terlalu kaku dan rumit serta menu AKLAP belum lengkap.	Meningkatkan kompleksitas kerja, rentan error, dan mengancam kualitas pelaporan keuangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi SIPD penatausahaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri adalah segera melakukan pemutakhiran ketika ada pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah, berkoordinasi dan berkonsultasi terkait kendala yang terjadi ke SETDA selaku leading sector penerapan SIPD penatausahaan keuangan, berhati-hati dalam melakukan penginputan pengajuan pencairan dan penginputan penerimaan serta pembuatan manual terkait laporan keuangan yang dibutuhkan.

Diskusi

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Tumija, Asep Hendra dan Marja Sinurat (2023) bahwa penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah masih ada kendala pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP), menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. Hambatan lain yakni a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait dengan AKLAP laporan Realisasi Anggaran, menunya belum tersedia, sehingga laporannya belum balance dan pengembalian LS Kas Umum belum sesuai. Strategi yang ditempuh dalam mengatasi hambatanya menggunakan strategi SO (Strength- Opportunity), SC (Strength-Culture) dan AgC (Agility-Culture).

Simpulan

Permendagri No. 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa SIPD adalah sistem yang mengelola informasi terkait pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan lainnya yang relevan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penatausahaan Keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Implementasi SIPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yakni kesesuaian prosedur pengeluaran kas, kesesuaian tata kelola pembukuan dan pelaporan serta konsistensi akuntabilitas pengguna.

Kendala dalam implementasi SIPD penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri yaitu : (a) sulitnya mengakses server pada waktu tertentu karena digunakan oleh seluruh pemerintah daerah, (b) ketidaksempurnaan aplikasi yang menyebabkan perubahan dan penyempurnaan sistem berulang kali, (c) adanya perbedaan tata cara pengoperasian atau siklus penginputan, (d) teknis penginputan yang tidak boleh terjadi kesalahan serta (d) terbatasnya akses terhadap laporan keuangan yang dibutuhkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi SIPD adalah : (a) Pemerintah Daerah membuat jadwal bergilir untuk input data, memecah beban kerja antar staf/bagian agar tidak semua masuk serentak pada waktu yang sama, (b) melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan serta keuangan daerah serta berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SETDA sebagai pengampu penerapan SIPD penatausahaan keuangan terkait kendala yang terjadi, (c) berhati-hati dalam penginputan penatausahaan pengeluaran dan penerimaan, (d) menyusun manual terkait laporan keuangan yang dibutuhkan, dan (e) mengajukan penambahan hak akses viewer resmi melalui admin SIPD di daerah. Upaya yang dilakukan tersebut berjalan dengan baik dan sangat membantu dalam pelaksanaan SIPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.

Implementasi SIPD dalam penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa sistem ini telah berjalan sesuai ketentuan regulasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, keberadaan berbagai kendala teknis seperti akses sistem yang tidak stabil, error aplikasi, serta keterbatasan infrastruktur memperlihatkan bahwa optimalisasi pemanfaatan SIPD masih memerlukan perhatian serius. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya penguatan infrastruktur server, peningkatan stabilitas aplikasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar proses pencatatan, penginputan, dan pelaporan keuangan dapat berlangsung lebih akurat, efisien, dan minim kesalahan. Selain itu, untuk memperkuat efektivitas implementasi sistem, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antarunit kerja dan penyediaan dukungan teknis yang responsif dari pihak pengembang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menilai secara lebih mendalam efektivitas pelatihan pengguna, menganalisis kesiapan organisasi dalam adopsi teknologi informasi, serta melakukan perbandingan kinerja SIPD dengan sistem

sebelumnya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak implementasi SIPD terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah. Secara praktis, hasil temuan ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pembaruan aplikasi, memperluas dukungan teknis, dan memperkuat mekanisme monitoring sehingga implementasi SIPD dapat berlangsung lebih optimal, adaptif, dan berkelanjutan.

Referensi

- Almazan, D. A., Tovar, Y. S., & Quintero, J. M. (2017). Influence of information systems on organizational results. *Contaduría y Administración*, 62(2), 321–338. doi : 10.1016/j.cya.2017.03.001
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Balqis, N., Z. Fadhly & Maulyanda. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. 11(1): 146-161.
- Dione, F. & U. Faradina. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan Di Daerah (Studi Tentang Penerapan Sipd Pada Bappeda Kota Bengkulu). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. 3 (1): 21-28.
- Edward, George C. (1980). *Implementing Public Policy Politics and Public Policy Series*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Fahzura, L & Najamudin. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social dan Policy Issues*:1-8
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Jun 2016, Hlm.15-30.
- Husaini, Usman. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jogiyanto, Hartono. 2004. *Pengenalan Komputer : Dasar Ilmu Komputer, Pemrograman, Sistem Informasi dan Intelegensi Buatan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Kabupaten Wonogiri. 2021. *Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri*. Pemerintah Kabupaten Wonogiri : Wonogiri.

- Kabupaten Wonogiri. 2023. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Kabupaten Wonogiri : Wonogiri.
- Kusumawardhani, Nisa. (2023), Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah (SETDA) Kota Magelang.
- Lumabi, A. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Pemberdayaan untuk Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Politico. Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota, IPEM4542/M.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, Suatu Sasaran Good Governenc. Jurnal Akuntansi Sektor Pemerintahan Vol.2 No.1.
- Maydianto & Ridho, MR. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale dengan Framewor CODEIGNITER pada CV Powershop. Jurnal Comase. 4(2): 50-59.
- Minta Indah Laoli, Ayler B Ndraha, Yasminar Telaumbanua. (2022). Implementasi SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus BPKPD Sebagai Leading Sektor Penganggaran). Jurnal Emba. 10(4) : 1381-1389,
- Moleong, L. J. (2016). Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M.I & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Setda) Kota Medan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 9(2) : 109.
- Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Indonesia. 2019. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Pramana, A.C. N. Yap., M. Rukmini., S. Mahmudi dan E. Agustina. (2023). Analisis Penerapan SIPD Pada SETDA Kabupaten Nganjuk . Jurnal Ekonomi Bisnis. 9(1): 45-58.
- Prehanto, Dedy Rahman. 2020. Konsep Sistem Informasi. Surabaya: Scopindo Media Pustaka

- Purnama, C. (2016). *Sistem Informasi Manajemen* (C. Anam (ed.)). Jakarta: Insan Global.
- Rijali, Ahmad (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 82-94
- Romney, Marshall B dan Steinbart Paul John. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). The Implementation of Public Policy: a Framework of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538-560.
- Sandiasa, Gede dan Putu Agustana, 2017. "Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah". *Jurnal Administrasi Publik*. Warmadewa. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/publik-inspiration/article/view/824>
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed.1, Cetakan ke-7. Bandung: Alfabeta.
- Setyawan, D & Srihardjono, B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang- Undang Desa Dengan Model Edward III di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 125-133.
- Sobandi, A., A.S. Febriyanto & D.S. Herdiant. (2023). Studi Literatur Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi*. 22(1): 125-134.
- Soleha, Nurhayati. (2014). Pengaruh Penerapan Metode Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan : Studi Pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *Jurnal Etikonomi* Vol. 13 No. 1 April 2014.
- Subarsono, A. (2012). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tahjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik..* Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Tumija & Erlambang, P.A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*. 5(2):155-169.

-
- Tumija, Asep Hendra & Marja Sinurat. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SETDA) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*. 5(1).
- Vellya Asril Imami. (2021). Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen dan Peranan Manajemen dalam Sistem Informasi. Pendidikan. Jambi: Timur Laut Aksara
- Wahap, S. A. (2012). Analisis Kebijakan : Dari formulasi ke penyusunan model - model implementasi kebijakan publik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wati, Herawati, dan Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *e-Journal S1 Akuntansi*, 2(1). Universitas Pendidikan Ganesha.
- Wati, Ni Kadek Mira. (2025). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Undergraduate thesis : Universitas Pendidikan Ganesha.